

Judul : Petugas SPBU dianiaya, Pertamina diminta beri perlindungan
Tanggal : Jumat, 27 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Petugas SPBU Dianiaya Pertamina Diminta Beri Perlindungan

ANGGOTA Komisi VI DPR Abdul Hakim Bafagih mendorong Pertamina memberi perlindungan maksimal pada operator SPBU yang jadi korban penganiayaan di kawasan Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur. Langkah itu penting sebagai bentuk dukungan pada petugas yang menjalankan tugas sesuai aturan.

Hakim mengapresiasi sikap petugas SPBU yang tetap profesional dalam menjalankan tugas sesuai prosedur operasional standar (SOP) meski menghadapi tekanan dari konsumen. Integritas tersebut layak mendapat dukungan dan perlindungan penuh.

Hakim menegaskan, segala bentuk tindakan kekerasan dan intimidasi di ruang publik sama sekali tidak dapat ditoleransi dalam kondisi apa pun. Aparat penegak hukum harus bertindak profesional untuk mengusut tuntas identitas pelaku, terutama jika benar melibatkan oknum dari institusi tertentu.

"Penegakan hukum yang adil sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan menjamin rasa aman bagi pekerja lapangan," kata Hakim dalam keterangannya, Kamis (26/2/2026).

Menurut Hakim, pemberian penghargaan kepada petugas jadi sinyal bahwa perusahaan berdiri tegas di belakang karyawan yang patuh terhadap aturan yang berlaku. Langkah itu dinilai penting, terutama bagi mereka yang tetap bekerja profesional meski harus menghadapi tekanan maupun ancaman.

"Ini jadi contoh bagi operator lain bahwa kepatuhan pada aturan adalah prioritas utama dan perusahaan tidak membiarkan karyawan menghadapi intimidasi sendirian,"

ucap politikus PAN itu.

Anggota Komisi III DPR Abdullah menambahkan, tindakan konsumen itu tidak hanya mencederai hukum, tapi menunjukkan sikap tidak patut dan merugikan masyarakat. Secara spesifikasi teknis, mobil mewah yang dikendarai pelaku seharusnya menggunakan BBM dengan RON 91 ke atas, dan penolakan petugas SPBU sudah sesuai aturan.

"Petugas SPBU sudah menjalankan tugas sesuai ketentuan. Tidak ada alasan bagi siapa pun untuk bertindak kasar, apalagi sampai melakukan kekerasan," ujar Abdullah.

Legislator PKB itu mengapresiasi langkah cepat aparat kepolisian yang telah menangkap pelaku. Respons cepat itu penting untuk menjaga wibawa hukum dan memberikan rasa keadilan bagi korban. Apalagi, pelaku telah melakukan sejumlah pelanggaran serius. Selain QR code yang tidak sesuai, pelaku juga melakukan penganiayaan dan mengaku-ngaku aparat.

"Perbuatannya berlapis dan tidak bisa dianggap sepele. Karena itu, saya meminta kepolisian bertindak tegas, dan dijerat pidana agar ada efek jera dan jadi pembelajaran bagi masyarakat," tegasnya.

Sebagai anggota Komisi III, dia menekankan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu. Terutama tindakan premanisme dan penyalahgunaan identitas aparat. Masyarakat wajib menghormati aturan, termasuk ketentuan penggunaan BBM sesuai spesifikasi kendaraan, serta tidak menyalahgunakan fasilitas atau mengintimidasi petugas di lapangan. ■ PVB